

BPK Tanya Gas Subsidi

Jangan Perpanjang Kontrak yang Sudah Habis

Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan mempertanyakan cadangan gas bersubsidi untuk pengguna tabung gas 3 kilogram. Kebutuhannya mencapai 3,16 juta metrik ton pada tahun 2010, tetapi yang tersedia hanya 2,8 juta metrik ton atau masih kurang 360.000 metrik ton.

"Itu belum memperhitungkan kebutuhan gas untuk volume 12 kilogram dan industri, total kebutuhannya akan mencapai 5 juta metrik ton per tahun. Fokus ini menjadi bagian penting dalam audit program konversi minyak tanah ke gas yang digelar pemerintah sejak 2007," ujar Ali Masykur Musa, anggota BPK bidang infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, dan energi, di Jakarta, Kamis (21/1).

Data yang diterima BPK menunjukkan, pada tahun 2010 pemerintah masih harus mendistribusikan 9,214 juta paket kompor dan tabung gas 3 kilogram agar dapat menggenapkan target 52 juta keluarga sasaran.

Menurut Ali, masih ada kekurangan 360.000 metrik ton pasokan gas per tahun untuk memenuhi kebutuhan semua pengguna gas konversi tersebut.

Atas dasar itu, BPK menetapkan audit yang paling tepat adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

PDTT merupakan audit yang menghasilkan sebuah kesimpulan komprehensif, tidak hanya rekomendasi, tetapi juga temuan yang mungkin mengarah ke tindak pidana.

"Bagaimana rencana pemerintah memenuhi kekurangan itu? Kalau mau impor, siapa yang memenangi tendernya dan bagaimana proses tendernya. Kami ingin semua itu jelas karena ini menyangkut hidup orang banyak," katanya.

Dengan rata-rata harga per paket sekitar Rp 298.000, anggaran awal yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung program konversi minyak tanah itu mencapai Rp 15,5 triliun.

Anggaran itu didistribusikan setiap tahun, yakni Rp 1,1 triliun pada tahun 2007, Rp 2,2 triliun tahun 2008, dan Rp 4,7 triliun tahun 2009.

"Jumlah paket dan anggaran itu sendiri membutuhkan pemeriksaan karena jumlahnya sangat besar, tetapi tidak pernah diaudit," ungkap Ali.

Terikat kontrak

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan, sebenarnya jumlah cadangan gas di Indonesia sangat besar, bahkan produksi gas melampaui kebutuhan.

Namun, gas yang diproduksi tersebut tidak seluruhnya bisa digunakan di dalam negeri karena Indonesia sudah terikat kontrak pengadaan gas jangka panjang dengan pihak asing.

"Atas dasar itu, kami mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tidak memperpanjang kontrak gas yang sudah habis. Selanjutnya, gas yang tersedia lebih diprioritaskan untuk penggunaan dalam negeri," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Energi Nasional Darwin Zahedy Saleh menyatakan, pihaknya akan mengkaji kembali mengenai alokasi domestik untuk gas dan batu bara. Alokasi domestik untuk gas saat ini diperkirakan 65 persen dari total produksi.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim, menambahkan, secara bertahap volume ekspor batu bara harus dikurangi untuk ketahanan energi. "Saat ini orientasi kebijakan terkait batu bara cenderung untuk ekspor. Seharusnya orientasi produksi batu bara untuk memenuhi kebutuhan domestik, sedangkan volume batu bara yang akan diekspor perlu dikendalikan," katanya.

Terkait pemanfaatan energi terbarukan untuk operasional pembangkit listrik dalam proyek 10.000 MW tahap kedua, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Surya Darma berharap komitmen pemerintah terhadap bauran energi.

"Investor tidak ada pilihan lain kecuali menjual listrik kepada PLN sehingga memerlukan kepastian pembelian listrik oleh PLN," ujar Herman.

Para pelaku usaha juga berharap penetapan harga listrik yang menjamin pengembalian biaya investasi sesuai dengan risiko yang diambil. (OIN/EVY)

Sumber : Kompas